

REBOUND POLITIK DAN KONVERSI MODAL SOSIAL: STUDI KASUS MANTAN KEPALA DESA TASIKMADU YANG KALAH PILKADES NAMUN TERPILIH MENJADI ANGGOTA DPRD

Nasika Naya Nathania¹, Wahyu Beny Mukti Setiyawan²

^{1,2}Program Studi Ilmu Politik, Universitas Negeri Semarang.

Email Korespondensi: nasikanayaa@students.unnes.ac.id

Email: nasikanayaa@students.unnes.ac.id; muktibeny@mail.unnes.ac.id

ABSTRACT

This study analyzes the phenomenon of political rebound experienced by a former village head of Tasikmadu, Trenggalek Regency, who lost the village head election but was later elected as a member of the Regional People's Representative Council (DPRD) at the regency level. The study focuses on the process of converting social capital, symbolic capital, and political capital that enabled a local actor to rebuild his political position after an electoral defeat at the village level. This research employed a qualitative approach with an explanatory case study design. Data were collected through observation, documentation, and in-depth interviews with the former village head as the main informant, campaign team members, political opponents, community leaders, and voters. The data were analyzed using Pierre Bourdieu's perspective on habitus, capital, and political field. The findings show that the defeat in the village head election was influenced by the weakening of bonding social capital due to the narrow, personal, and socially sensitive character of the village political arena. The practice of botohan, or local political betting, also affected swing voters during the final stage of the contest. In contrast, victory in the legislative election was achieved because of a shift from the micro-level village arena to a broader electoral field. The former village head was able to convert symbolic capital in the form of leadership track record, activate bridging social capital through cross-village networks and programmatic approaches, and utilize linking social capital to read the electoral map and strategically choose a political party. This study concludes that electoral defeat at the village level does not necessarily end the political career of a local actor, but may become a starting point for the reactivation of political capital in a wider political arena.

Keywords: Political rebound, Social capital, Pierre Bourdieu, Village head election.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis fenomena political rebound pada mantan Kepala Desa Tasikmadu, Kabupaten Trenggalek, yang mengalami kekalahan dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), tetapi kemudian berhasil terpilih sebagai anggota DPRD dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) tingkat kabupaten. Fokus penelitian diarahkan pada proses konversi modal sosial, modal simbolik, dan modal politik yang memungkinkan aktor lokal membangun kembali posisi politiknya setelah mengalami kekalahan elektoral di tingkat desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus eksplanatif. Data diperoleh melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam dengan mantan kepala desa sebagai informan utama, tim sukses, pihak oposisi, tokoh masyarakat, serta masyarakat pemilih. Analisis dilakukan dengan menggunakan perspektif Pierre Bourdieu mengenai habitus, modal, dan ranah politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekalahan dalam Pilkades dipengaruhi oleh pelemahan bonding social capital akibat karakter arena desa yang sempit, personal, dan sarat sentimen sosial. Praktik botohan atau taruhan politik lokal juga turut memengaruhi pemilih mengambang pada fase akhir kontestasi. Sebaliknya, kemenangan dalam Pileg terjadi karena perubahan ranah politik dari arena mikro desa menuju arena elektoral yang lebih luas. Mantan kepala desa mampu mengonversi modal simbolik berupa rekam jejak kepemimpinan, mengaktifkan bridging social capital melalui jaringan lintas desa dan pendekatan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

programatik, serta memanfaatkan linking social capital untuk membaca peta dukungan dan memilih kendaraan partai secara taktis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kekalahan elektoral di tingkat desa tidak selalu mengakhiri karier politik aktor lokal, tetapi dapat menjadi titik awal reaktivasi modal politik dalam arena yang lebih luas.

Kata kunci: Political rebound, Modal sosial, Pierre Bourdieu, Pilkades.

PENDAHULUAN

Politik desa merupakan salah satu ruang yang memperlihatkan dinamika demokrasi lokal di Indonesia. Pasca-Reformasi, desa tidak lagi dipandang sekadar sebagai wilayah administratif di bawah pemerintahan yang lebih tinggi, melainkan berkembang menjadi arena sosial-politik tempat berbagai aktor membangun pengaruh, legitimasi, dan dukungan politik. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa demokrasi lokal berjalan melalui interaksi antara masyarakat, pemimpin lokal, dan struktur kekuasaan yang lebih luas (Luthfy, 2014). Kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa semakin memperkuat posisi desa dengan memberikan kewenangan yang lebih besar dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pengelolaan kepentingan masyarakat (Syukri et al., 2018). Jabatan kepala desa dalam konteks tersebut memiliki posisi strategis karena berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat melalui pelayanan publik, pembangunan, kegiatan sosial, dan penyelesaian berbagai persoalan warga. Kedekatan tersebut memungkinkan kepala desa membangun jaringan sosial, reputasi, serta pengalaman politik yang dapat menjadi sumber daya dalam arena politik yang lebih luas (Hidayat, 2019).

Fenomena kepala desa yang mengalami kekalahan dalam Pilkades tetapi kemudian berhasil memenangkan pemilihan legislatif menunjukkan bahwa kekalahan elektoral tidak selalu mengakhiri perjalanan politik seorang aktor lokal. Kekalahan dalam Pilkades sering dipersepsikan sebagai menurunnya dukungan politik masyarakat terhadap seorang kandidat. Kondisi tersebut tidak selalu menghilangkan seluruh modal sosial yang telah dibangun selama masa kepemimpinan. Hubungan dengan masyarakat, jaringan lintas desa, kedekatan dengan tokoh lokal, serta relasi dengan partai politik dapat tetap bertahan dan menjadi sumber daya politik yang dapat dimanfaatkan kembali pada arena elektoral yang berbeda (Hidayat, 2019). Fenomena ini menunjukkan bahwa keberhasilan politik tidak hanya ditentukan oleh hasil suatu kontestasi, tetapi juga oleh kemampuan aktor mempertahankan, mengelola, dan mengonversi sumber daya sosial yang dimilikinya.

Kasus mantan Kepala Desa Tasikmadu yang kalah dalam Pilkades tetapi kemudian terpilih sebagai anggota DPRD memperlihatkan adanya perpindahan arena politik dari tingkat desa menuju tingkat legislatif daerah. Pilkades dan Pileg memiliki karakteristik kompetisi yang berbeda. Pilkades berlangsung dalam ruang sosial yang relatif sempit, di mana hubungan kekerabatan, kedekatan personal, pengalaman langsung masyarakat terhadap kandidat, dan dinamika sosial lokal memiliki pengaruh yang kuat. Penilaian terhadap figur kandidat sering kali dipengaruhi oleh kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan sebelumnya, hubungan keluarga, afiliasi kelompok, maupun persoalan-persoalan lokal yang berkembang di desa (Luthfy, 2014). Pileg berlangsung dalam wilayah yang lebih luas sehingga kandidat tidak hanya bergantung pada dukungan masyarakat di desa asal, tetapi juga dapat memperoleh suara dari berbagai desa dan kelompok masyarakat lain dalam daerah pemilihan.

Fenomena tersebut dapat dipahami melalui perspektif Pierre Bourdieu mengenai relasi antara habitus, modal, dan ranah. Habitus merujuk pada kecenderungan berpikir dan bertindak yang terbentuk melalui pengalaman sosial yang panjang. Modal merujuk pada sumber daya yang dapat digunakan aktor untuk memperoleh posisi dalam suatu arena, baik berupa modal sosial, modal ekonomi, modal budaya, maupun modal simbolik. Ranah merupakan arena persaingan tempat aktor menggunakan modal yang dimilikinya untuk mempertahankan atau meningkatkan posisi sosial-politiknya (Aswan, 2025). Dalam konteks penelitian ini, pengalaman sebagai kepala desa membentuk habitus politik melalui interaksi dengan

masyarakat, pengelolaan konflik, pembangunan jaringan, serta hubungan dengan birokrasi dan struktur politik yang lebih luas. Pengalaman tersebut menjadi bekal ketika aktor memasuki arena Pileg yang menuntut kemampuan membangun dukungan dalam skala yang lebih besar.

Modal sosial yang dimiliki mantan kepala desa dapat dipahami melalui tiga bentuk utama, yaitu bonding social capital, bridging social capital, dan linking social capital. Bonding social capital merujuk pada ikatan sosial yang terbentuk melalui kedekatan emosional, kekerabatan, dan interaksi sehari-hari dalam komunitas desa. Bridging social capital menghubungkan aktor dengan kelompok atau komunitas lain di luar lingkungan terdekatnya. Linking social capital merujuk pada hubungan dengan pihak yang memiliki posisi lebih tinggi dalam struktur sosial dan politik, seperti birokrasi daerah, pengurus partai, dan elite politik lokal (Dewi, 2024). Kekalahan dalam Pilkades dapat menunjukkan melemahnya sebagian bonding social capital akibat perubahan preferensi politik masyarakat, munculnya kandidat baru, atau konflik lokal. Bridging social capital dan linking social capital yang telah dibangun selama menjabat tetap dapat dimanfaatkan dalam arena Pileg ketika aktor mampu membaca perubahan ranah politik.

Penelitian ini menjelaskan bagaimana kekalahan politik di tingkat desa tidak selalu menghilangkan peluang politik aktor lokal untuk tetap berpartisipasi dalam kontestasi politik pada arena yang berbeda. Kajian mengenai Pilkades selama ini lebih banyak menyoroti praktik politik uang, patronase, dan peran broker politik, sedangkan kajian mengenai Pileg cenderung menekankan pentingnya modal politik, jaringan sosial, dan strategi elektoral kandidat. Penelitian ini menghubungkan kedua arena tersebut dengan menelaah proses perpindahan aktor dari arena Pilkades menuju arena Pileg. Fokus penelitian tidak hanya pada hasil berupa kekalahan dan kemenangan elektoral, tetapi juga pada mekanisme konversi modal sosial, modal simbolik, dan pengalaman politik yang memungkinkan aktor mempertahankan serta meningkatkan posisinya dalam ranah politik. Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis proses political rebound mantan Kepala Desa Tasikmadu melalui konversi modal sosial, modal simbolik, dan pengalaman kepemimpinan desa setelah mengalami kekalahan dalam Pilkades hingga berhasil terpilih sebagai anggota DPRD.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan dan desain studi kasus eksplanatif untuk memahami proses rebound politik mantan Kepala Desa Tasikmadu setelah mengalami kekalahan dalam Pilkades hingga berhasil terpilih sebagai anggota DPRD. Penelitian dilaksanakan pada 21 April–21 Mei 2026 di Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling yang terdiri atas mantan kepala desa sebagai informan utama serta tim sukses, rival politik, tokoh masyarakat, tokoh agama, kepala dusun, dan masyarakat pemilih sebagai informan pendukung (Sugiyono, 2021). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi lapangan, dan studi dokumentasi terhadap data Pilkades, Pileg, arsip pemberitaan, serta dokumen lain yang relevan (Creswell, 2016). Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014), dengan menggunakan kerangka teoretis Pierre Bourdieu yang mencakup habitus, modal sosial, modal simbolik, dan ranah politik sebagai alat analisis untuk menjelaskan proses konversi modal dan rebound politik aktor. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik guna memastikan kredibilitas dan konsistensi temuan penelitian (Sugiyono, 2021).

PEMBAHASAN

Pilkades sebagai Tarung dalam Kurungan

Pak Imam merupakan mantan Kepala Desa Tasikmadu yang menjadi informan utama dalam penelitian ini. Ia mengalami kekalahan dalam Pemilihan Kepala Desa, tetapi kemudian berhasil terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Trenggalek. Kekalahan Pak Imam dalam Pilkades Tasikmadu tidak dapat dijelaskan hanya melalui rendahnya kepuasan masyarakat terhadap kinerjanya sebagai kepala desa.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Keterangan informan menunjukkan bahwa kepuasan publik terhadap kepemimpinannya masih berada pada kisaran 60%, sehingga secara simbolik Pak Imam masih memiliki bekal politik sebagai petahana. Persoalan utama justru terletak pada karakter Pilkades sebagai arena mikro yang sangat personal, sempit, dan emosional. Relasi keluarga, kedekatan lingkungan, konflik lokal, dan sentimen antarpendukung dapat memengaruhi pilihan warga secara lebih kuat daripada capaian administratif. Modal sosial yang dibangun melalui pelayanan desa, pembebasan biaya administrasi, pelayanan kesehatan, dan pembangunan pasar tidak otomatis berubah menjadi kemenangan elektoral. Penelitian Aspinall dan Rohman (2017) menunjukkan bahwa Pilkades di Jawa sering dipengaruhi oleh jaringan sosial, politik uang, dan broker lokal yang bekerja sangat dekat dengan pemilih desa.

“Karena Pilkades ini adalah salah satu pilihan menurut saya lebih sulit dari Pileg karena sulitnya gini, dalam suatu kontestasi di desa tidak ada pilihan lain selain jadi. Pilkades ini soalnya tarung dalam kurungan, mau ndak mau ya harus menang kan begitu” (Informan Utama, 2026).

Kutipan tersebut memperlihatkan bahwa Pilkades dipahami sebagai ranah yang membatasi ruang gerak kandidat. Istilah tarung dalam kurungan menunjukkan bahwa kandidat tidak memiliki alternatif wilayah ketika sebagian warga sudah menunjukkan penolakan. Seluruh pertarungan terkonsentrasi dalam satu desa, sehingga kandidat berhadapan dengan pemilih yang saling mengenal dan membawa memori sosial ke dalam pilihan politik. Modal simbolik sebagai kepala desa berprestasi tetap memiliki nilai, tetapi nilainya menurun ketika masuk ke arena yang dipenuhi sentimen personal dan pembelahan kelompok. Dalam perspektif Bourdieu, nilai suatu modal selalu ditentukan oleh struktur ranah yang mengakuinya. Kajian Pioh (2024) tentang broker politik dalam pemilihan kepala desa juga menunjukkan bahwa dinamika elektoral di tingkat desa sangat bergantung pada aktor perantara yang membaca hubungan sosial warga secara langsung.

Overconfidence Tim dan Pelemahan Infrastruktur Dukungan

Kekalahan Pak Imam juga berkaitan dengan kelengahan internal tim pendukung. Sebagai petahana dengan tingkat kepuasan publik yang relatif baik, tim sukses cenderung merasa bahwa kemenangan dapat diraih dengan mudah. Sikap tersebut membuat tim kurang peka membaca perubahan dukungan di tingkat bawah. Dalam Pilkades, pergeseran suara kecil pada tingkat RT dapat menentukan hasil akhir karena arena pemilihan sangat terbatas. Selisih kekalahan 49 suara memperlihatkan bahwa kegagalan membaca perubahan mikro dapat berdampak langsung pada hasil elektoral. Studi Pioh (2024) menjelaskan bahwa broker atau tim pemenangan dalam pemilihan kepala desa berperan sebagai penghubung antara kandidat dan pemilih sekaligus sebagai pembaca dinamika sosial di akar rumput.

“Sebenarnya waktu menjabat rating kita waktu itu cukup tinggi. Saya mencoba menggunakan jasa survey bahkan sekitar 60%. Namun pada saat itu timses saya ini menganggap mudah lawan seperti sombong dan jumawa. Nah ini yang justru mendowngrade kita pelan-pelan turun” (Informan Utama, 2026). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kekalahan elektoral tidak hanya dipengaruhi oleh figur kandidat, tetapi juga oleh kualitas kerja organisasi pendukung. Modal sosial tidak cukup hanya dimiliki, tetapi harus terus dirawat melalui komunikasi, pemetaan suara, dan pembacaan perubahan sikap warga. Tim yang terlalu percaya pada popularitas kandidat dapat kehilangan kepekaan terhadap perubahan kecil dalam masyarakat. Modal simbolik sebagai kepala desa dengan rekam jejak pembangunan tidak dapat bekerja optimal apabila tidak disertai kerja politik yang disiplin. Dalam kajian politik elektoral lokal, broker dan jaringan pendukung menjadi aktor kunci karena mereka menghubungkan kandidat dengan pemilih, mengelola informasi, dan menggerakkan dukungan pada tahap akhir pemilihan (Hidayaturrehman et al., 2022).

Botohan, Modal Ekonomi, dan Fragmentasi Sosial

Praktik botohan atau taruhan politik lokal menjadi faktor lain yang melemahkan posisi Pak Imam dalam Pilkades. Praktik ini tidak hanya dapat dilihat sebagai aktivitas ekonomi informal, tetapi juga

sebagai mekanisme sosial yang ikut memengaruhi arah dukungan politik. Pada fase akhir Pilkades, posisi suara antarkandidat berada dalam keadaan berimbang. Kelompok pemilih mengambang menjadi rentan dipengaruhi oleh tekanan sosial, arus dukungan, dan insentif ekonomi yang berkembang melalui taruhan. Rekam jejak pembangunan tidak selalu menjadi dasar utama pilihan ketika kontestasi bergerak dalam logika pragmatis. Kajian Hidayatullah et al. (2022) menunjukkan bahwa uang, broker, dan tekanan sosial dapat memengaruhi pilihan pemilih dalam kontestasi politik lokal di Indonesia.

“Sampai pada detik-detik Pilkades akhirnya posisi benar-benar berimbang dengan berbagai macam taruhan/botohan. Kalah 49 suara dari DPT 9000, kalau kita akumulasi ya kita satu RT kalah 1 orang, memang agak sulit di Tasikmadu ini. Banyak gambler/penjudi jadi suara yang ngambang bisa dimainkan. Itu yang membuat kekalahan” (Informan Utama, 2026).

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa kekalahan dengan selisih kecil berkaitan dengan pergerakan pemilih mengambang pada fase akhir kontestasi. Suara mengambang menjadi ruang perebutan yang tidak hanya ditentukan oleh program, tetapi juga oleh suasana sosial dan ekonomi menjelang pencoblosan. Modal ekonomi dapat mengintervensi kerja modal simbolik ketika arena politik memberi ruang bagi praktik pragmatis. Reputasi sebagai kepala desa dengan capaian pembangunan tetap ada, tetapi daya pengaruhnya melemah ketika pemilih berada dalam tekanan kontestasi ekonomi dan sosial. Kajian Aspinall dan Rohman (2017) memperlihatkan bahwa politik uang dalam Pilkades tidak berdiri sendiri, melainkan bekerja melalui jaringan lokal dan relasi sosial yang dekat dengan pemilih desa.

“Sebenarnya suara Pak Imam dengan lawannya itu sama-sama kuat. Dengar-dengar selisih suara Pak Imam sama Pak Riyono hanya sedikit. Dulu itu ramai banget taruhan juga antara pendukung keduanya. Bahkan banyak yang sampai musuhan karena beda pilihan. Pendukung Pak Riyono itu ndak main-main soal nominal taruhannya. Pas Pak Riyono menang ada yang sampai buat syukuran besar” (Informan Oposisi, 2026).

“Secara kinerja dibanding calon lainnya sama-sama bagus, juga bermasyarakat dengan baik. Tapi kurang adanya dukungan finansial dibanding lawan. Kurang lebih begitu karena pendukung dari lawan bisa dibbilang jor-joran buat taruhan juga” (Informan Oposisi, 2026).

Dua kutipan tersebut menunjukkan bahwa kekalahan Pak Imam tidak semata-mata disebabkan oleh penolakan terhadap kinerjanya. Informan oposisi tetap mengakui bahwa secara kinerja Pak Imam dan kandidat lain dinilai baik serta bermasyarakat. Faktor pembeda justru terletak pada dukungan finansial dan intensitas taruhan politik. Modal simbolik berupa reputasi dan modal budaya berupa pengalaman pemerintahan desa mengalami penurunan nilai ketika kontestasi bergerak dalam logika ekonomi informal. Fragmentasi sosial akibat Pilkades juga tampak dari keterangan tokoh masyarakat mengenai pecahnya kegiatan keagamaan setelah kontestasi. Kajian Haridison (2024) menunjukkan bahwa pemilihan kepala desa dapat melibatkan broker, otoritas sosial, budaya lokal, dan relasi komunitas yang memengaruhi mobilisasi dukungan.

“Kalau Mbah Riyono, lawan politik Pilkades Pak Imam tiga kali, itu sampai membubarkan jamaah Jumat Legi yang diikuti beberapa RW. Saya sudah berusaha menyatukan tapi sudah tidak bisa karena beberapa orang fanatik. Masa cuma karena pilihan semuanya jadi bubar, yasinan bubar, pengajian bubar” (Tokoh Masyarakat, 2026).

Dari Arena Mikro ke Arena Elektoral yang Lebih Luas

Keberhasilan Pak Imam dalam Pileg setelah kalah dalam Pilkades dapat dijelaskan melalui perbedaan karakter antara dua arena tersebut. Pilkades merupakan kontestasi mikro yang terikat pada relasi personal, kedekatan geografis, dan sejarah konflik lokal. Pileg memiliki cakupan wilayah lebih luas karena kandidat tidak hanya bergantung pada suara di desa asal. Perbedaan cakupan ini membuat strategi politik dalam Pileg lebih fleksibel. Kandidat dapat memilih wilayah yang potensial, menghindari wilayah yang resistensinya kuat, dan mengelola dukungan secara lebih selektif. Dalam kerangka Bourdieu, perubahan ranah mengubah nilai modal dan cara aktor menggunakan sumber daya politiknya. Kajian Ramadhani

(2024) tentang Pileg 2024 menunjukkan bahwa kandidat menggunakan modal sosial, modal politik, dan modal ekonomi secara berbeda sesuai strategi kampanye dan karakter wilayah pemilih.

“Pileg ini saya sampaikan seperti di awal kalau kita tahu betul tentang dunia pencalegan itu jauh lebih mudah dari Pilkades. Ketika si A ini misalnya sudah jelas-jelas ndak mau milih, ini kan susah diyakinkan. Kalau Pileg mungkin cari yang lain masih bisa” (Informan Utama, 2026).

Kutipan tersebut menjelaskan bahwa Pileg memberi ruang manuver yang tidak tersedia dalam Pilkades. Ketika satu kelompok pemilih tidak dapat diyakinkan, kandidat dapat mencari dukungan dari wilayah lain. Logika ini berbeda dengan Pilkades yang menuntut kandidat menghadapi seluruh pemilih dalam satu desa yang sama. Pileg memungkinkan strategi diversifikasi dukungan, sehingga kegagalan memperoleh suara di satu titik dapat dikompensasi melalui penguatan wilayah lain. Strategi ini terlihat dari cara tim Pak Imam memilih desa-desa yang dinilai potensial dalam daerah pemilihan. Studi Amalia (2025) tentang strategi kampanye legislatif menunjukkan bahwa keberhasilan kandidat dapat ditopang oleh strategi berbasis komunitas, jaringan sosial, pendekatan langsung, serta partisipasi dalam kegiatan sosial dan budaya.

“Secara umum Pak Imam di sini, Watulimo, mengambil 9 desa dari secara keseluruhan 12 desa. Jadi sisanya tidak terlalu disinggung paling cuma yang kenal-kenal saja. Seumpama Pak Imam masuk kan 500 dapatnya cuma 55. Jadi daripada harapan palsu jadi mending yang lain” (Tim Sukses, 2026).

Keterangan tim sukses memperlihatkan bahwa kemenangan Pileg tidak dibangun dengan cara menguasai seluruh wilayah, tetapi dengan memilih wilayah yang paling memungkinkan menghasilkan suara. Strategi ini memperlihatkan perbedaan mendasar antara Pilkades dan Pileg. Pilkades menempatkan kandidat dalam arena tertutup, sedangkan Pileg membuka ruang bagi pemetaan politik yang lebih selektif. Kekalahan di desa asal tidak menjadi hambatan mutlak karena suara dapat diperoleh dari desa lain. Modal sosial yang tidak bekerja maksimal sebagai bonding capital di desa asal kemudian dialihkan melalui jaringan lintas desa. Kajian Sabaggalet (2024) tentang pemilihan legislatif menunjukkan bahwa modal sosial komunitas dapat menjadi basis penting dalam menentukan dukungan suara pada Pileg.

Perubahan Nalar Pemilih: Dari Sentimen Lokal ke Representasi Daerah

Perbedaan Pilkades dan Pileg juga tampak dari cara masyarakat memaknai jabatan yang diperebutkan. Dalam Pilkades, Pak Imam dinilai sebagai pemimpin administratif desa yang berhubungan langsung dengan pelayanan dan relasi harian warga. Dalam Pileg, ia dipandang sebagai wakil politik yang dapat membawa aspirasi desa atau wilayah ke tingkat kabupaten. Perubahan fungsi jabatan ini mengubah nalar pemilih. Warga yang sebelumnya tidak mendukung Pak Imam sebagai kepala desa masih dapat mendukungnya sebagai calon anggota DPRD karena menganggap posisi legislatif memiliki manfaat representatif bagi desa. Perubahan ini memperlihatkan bahwa pilihan politik dapat berubah sesuai ranah, posisi, dan manfaat yang dibayangkan pemilih. Kajian Tampubolon (2025) menunjukkan bahwa kepercayaan, warisan politik, jaringan, dan aktivitas lapangan menjadi bagian dari modal politik yang dapat memperkuat kandidat legislatif.

“Masyarakat tahu cakupan DPRD itu lebih luas, sehingga walau mungkin kurang setuju menjadi kades tapi mendukung penuh menjadi DPRD karena bangga ada perwakilan dari desanya menyuarakan aspirasinya di kabupaten. Tidak ada yang salah karena kades dan DPRD beda peran dan cakupannya. Bisa jadi bermusuhan saat Pilkades tapi jadi satu tim dalam pilihan dewan” (Informan Oposisi, 2026).

“Uniknya meskipun kalah Pilkades terakhir tapi mungkin warga desa itu juga ada rasa bangga karena orang dari desanya sendiri nyalon DPRD dengan harapan aspirasi warga desa ini dapat didengar dan lebih mudah direalisasikan” (Informan Oposisi, 2026).

Kedua kutipan tersebut memperlihatkan bahwa resistensi terhadap Pak Imam dalam Pilkades tidak sepenuhnya terbawa ke Pileg. Perubahan jabatan membuat masyarakat menilai ulang manfaat politik dari pencalonan Pak Imam. Dalam Pilkades, pemilih dapat menolak karena sentimen personal, konflik lokal,

atau kejenuhan terhadap petahana. Dalam Pileg, pemilih dapat memberi dukungan karena melihat peluang representasi dan akses aspirasi di tingkat kabupaten. Status sebagai orang desa sendiri yang maju ke DPRD menjadi sumber kebanggaan kolektif. Modal simbolik sebagai mantan kepala desa dan putra daerah kemudian dikonversi menjadi modal politik. Kajian Tampubolon (2025) memperkuat argumen bahwa kepercayaan dan pengenalan publik dapat menjadi modal politik penting dalam strategi elektoral kandidat legislatif.

Modal Simbolik Eks-Kepala Desa dan Rekam Jejak Kepemimpinan

Proses political rebound Pak Imam dimulai dari kesadaran bahwa kekalahan Pilkades tidak menghapus seluruh sumber daya politik yang telah ia miliki. Setelah kalah dalam Pilkades, ia tetap memiliki niat maju dalam Pileg dan meminta pertimbangan kepada tokoh masyarakat serta tim yang sebelumnya terlibat dalam kontestasi desa. Keputusan ini menunjukkan bahwa kekalahan dimaknai sebagai titik peralihan menuju arena yang berbeda. Kondisi logistik yang lemah setelah Pilkades membuatnya tidak dapat mengandalkan modal ekonomi secara dominan. Kekuatan utama justru berada pada jaringan sosial, dukungan moral, pengalaman kepemimpinan, dan reputasi yang masih bertahan. Kajian Ramadhani (2024) menunjukkan bahwa kandidat legislatif dapat mengombinasikan modal sosial, modal politik, dan modal ekonomi untuk membangun strategi kemenangan dalam Pileg.

“Kalah itu tadi, kebetulan yo memang dalam niatan ada nyaleg dari awal. Akhirnya di akhir Maret saya mendaftarkan diri sebagai caleg, itupun juga dengan mengumpulkan tokoh masyarakat utamanya timses Pilkades itu kita mintai pertimbangan. Sebenarnya secara logistik kita lemah. Aku bar kalah lurah ndak punya apa-apa, blas ga nduwe duwet. Alhamdulillah terselamatkan oleh kondisi masih banyak orang membantu” (Informan Utama, 2026).

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa dukungan sosial menjadi sumber daya utama ketika modal ekonomi berada dalam kondisi terbatas. Pak Imam tidak memulai Pileg dari ruang kosong karena telah memiliki reputasi sebagai mantan kepala desa dan jaringan yang terbentuk selama menjabat. Modal simbolik berupa rekam jejak pembangunan menjadi bahan legitimasi ketika ia memperkenalkan diri kepada pemilih di luar Tasikmadu. Masyarakat luar desa tidak terlibat langsung dalam konflik Pilkades, sehingga lebih mudah menilai Pak Imam berdasarkan capaian kepemimpinannya. Kekalahan Pilkades tidak menghancurkan modal simbolik, tetapi membatasi efektivitasnya dalam ranah desa asal. Studi Tampubolon (2025) memperlihatkan bahwa rekam jejak, kepercayaan, dan aktivitas lapangan dapat menjadi unsur penting modal politik kandidat legislatif.

“Jadi warga di luar Tasikmadu memandang saya kalah itu banyak yang ndak menduga, karena prestasi saya itu bisa dilihat di luar. Emang lurah e dadi lurah yo apik, pasar selesai. Jadi prestasi di Tasikmadu walaupun gagal secara pilihan itu artinya masih bisa jadi modal. Jadi waktu memberikan gambaran misalnya di daerah-daerah pinggiran yang ndak kenal sebelumnya kita bisa sampaikan waktu jadi kades prestasi saya ini” (Informan Utama, 2026).

“Kalau yang kenal daerah Tasikmadu ya tentunya pasti melihat itu, apalagi yang tahu track record-nya Pak Imam pasti menilai itu. Yang membuat enak itu malah karena Pak Imam sudah punya nama secara figur bisa dijual. Beratnya ya cuma di pengenalan partai” (Tim Sukses, 2026).

Kedua kutipan tersebut memperlihatkan bahwa status eks-kepala desa menjadi modal simbolik yang dapat dikampanyekan. Pak Imam tidak hadir sebagai kandidat baru tanpa rekam jejak, tetapi sebagai figur yang memiliki pengalaman pemerintahan dan capaian pembangunan. Tim sukses melihat bahwa figur Pak Imam sudah memiliki nilai jual politik karena masyarakat dapat menghubungkannya dengan pengalaman memimpin desa. Tantangan utama dalam Pileg bukan lagi memperkenalkan kapasitas personal, tetapi memperkenalkan kendaraan partai dan mengubah pengenalan figur menjadi suara. Proses ini menunjukkan bahwa modal simbolik membutuhkan kerja penerjemahan politik. Kajian Amalia (2025) menjelaskan bahwa strategi kampanye legislatif dapat memanfaatkan jaringan sosial, kegiatan komunitas, dan simbol solidaritas untuk memperkuat keberhasilan kandidat.

Bridging Capital, Politik Programatik, dan Kepercayaan Publik

Pak Imam juga mengaktifkan bridging social capital melalui jaringan lintas desa dan kelompok sosial. Ketika bonding capital di desa asal mengalami keretakan, jaringan yang menjembatani kelompok luar menjadi sumber daya penting. Dukungan dari keluarga besar dan pemilih fanatik di Tasikmadu tetap menjadi modal awal, tetapi kemenangan Pileg membutuhkan perluasan ke wilayah lain. Keterangan tokoh masyarakat menunjukkan bahwa sebagian basis pendukung Pak Imam masih bertahan karena ikatan keluarga, kedekatan sosial, dan loyalitas politik. Kondisi ini menunjukkan bahwa bonding capital tidak runtuh sepenuhnya, melainkan melemah pada kelompok tertentu. Kajian Sabaggalet (2024) menunjukkan bahwa modal sosial komunitas dapat menjadi basis penting dalam pembentukan dukungan pada pemilihan legislatif.

“Masih utuh, pendukungnya cukup fanatik. Selain fanatik faktor keluarganya Mas Imam itu keluarga besar. Di Tasikmadu sebenarnya terkecuali keluarganya Mbah Saian saja. Sama kaya Mahabarata satunya Pandawa satu lagi Kurawa. Tapi di sini itu pemilihnya fanatik, maksudnya meskipun dibeli orang sini itu kadang kalau sudah fanatik ya gitu. Jadi berangkatnya Mas Imam ke dewan dari sini sudah punya banyak modal suaranya utuh” (Tokoh Masyarakat, 2026).

Jaringan tersebut diperluas melalui pendekatan programatik kepada kelompok pemuda, komunitas keagamaan, dan wilayah pinggiran. Tim sukses menjelaskan bahwa kelompok pemilih pemula dan pemuda Muhammadiyah didekati melalui forum serta program pemberdayaan. Wilayah Ngrancah yang membutuhkan akses air bersih menjadi contoh bagaimana aspirasi lokal dikonversi menjadi dukungan politik. Strategi ini memperlihatkan bahwa bridging capital tidak hanya terbentuk melalui kedekatan personal, tetapi juga melalui kemampuan kandidat menjawab kebutuhan konkret masyarakat. Hubungan politik dibangun bukan hanya melalui transaksi uang tunai, tetapi melalui program yang dirasakan manfaatnya oleh komunitas. Kajian Amalia (2025) menunjukkan bahwa kampanye berbasis komunitas, kegiatan sosial, dan kedekatan jaringan dapat membentuk keberhasilan kandidat legislatif.

“Yang banyak itu pemula terutama kalau secara golongan di wilayah sini itu pemuda Muhammadiyah. Cara mendekatinya ya melalui forum dan saya buat program. Pemuda Muhammadiyah itu mereka suka kalau diadakan pemberdayaan dan tanpa membawa embel-embel organisasi pribadi. Kalau teman itu sedikit. Terutama Pak Imam itu kalau janji ndak pernah diingkari. Kaya Ngrancah itu daerah jauh atas gunung sana, tapi di sana dapat banyak. Pada saat itu mintanya akses air bersih ya langsung diberikan bantuannya. Itu sampai sekarang jadi basisnya Pak Imam” (Tim Sukses, 2026).

Kepercayaan publik juga diperkuat melalui narasi integritas dalam pengelolaan program aspirasi. Mas Budi menyampaikan bahwa bantuan untuk madrasah pernah diberikan secara utuh tanpa pemotongan. Keterangan ini memperlihatkan bahwa modal sosial Pak Imam tidak hanya dibentuk oleh jaringan, tetapi juga oleh reputasi moral dalam menyalurkan bantuan. Pemilih dan tokoh masyarakat tidak hanya mengingat bantuan yang diberikan, tetapi juga cara bantuan itu dikelola. Tindakan yang dianggap jujur dan sesuai harapan masyarakat dapat menghasilkan modal simbolik. Modal simbolik tersebut memperkuat modal politik karena kandidat dipersepsikan sebagai figur yang dapat dipercaya. Kajian Tampubolon (2025) menunjukkan bahwa kepercayaan, aktivitas lapangan, dan relasi langsung dengan masyarakat menjadi unsur penting dalam strategi elektoral kandidat legislatif.

“Mas Imam iku nyairne uang madrasah blas ndak njalok jatah. Uang senilai 5 juta tersebut diterima tetapi langsung diberikan pada pembangunan masjid, bener utuh 100 juta. Teman-teman yang lain termasuk dari PKB sekretarisnya pada protes ke saya. Karena Jasmas mereka dipotong. Bener-bener utuh 100 juta jasmas kita. Kalau kaitan dengan hal seperti itu Mas Imam sama sekali ndak berubah” (Tokoh Masyarakat, 2026).

Habitus Adaptif, Pilihan Partai, dan Linking Capital

Keberhasilan Pak Imam dalam Pileg juga berkaitan dengan habitus adaptif dalam membaca struktur peluang partai. Setelah kalah dalam Pilkades, ia tetap dilirik oleh beberapa partai karena masih memiliki basis suara dan pengenalan publik. Kekalahan tidak menghilangkan nilai politik Pak Imam di hadapan partai. Perolehan suara dalam Pilkades, meskipun tidak menghasilkan kemenangan, tetap menjadi indikator kekuatan massa. Partai melihat figur seperti Pak Imam sebagai calon yang memiliki potensi elektoral karena sudah memiliki jaringan sosial dan pengalaman kontestasi. Kajian Kristiyanto (2023) menunjukkan bahwa partai politik dalam demokrasi elektoral Indonesia berhadapan dengan kebutuhan menjaga daya tahan organisasi dan strategi rekrutmen aktor yang mampu memperkuat posisi elektoral partai.

“Waktu itu partai yang ngelamar saya banyak karena di Pilkades dapat saya banyak walaupun ndak jadi. Jadi PDI ngelamar saya, PKS nglamar saya, terakhir Gerindra ngelamar saya. Kenapa saya ke Gerindra itu sebenarnya saya tidak terlalu fanatik partai meskipun sakjane saya orang PDI” (Informan Utama, 2026).

Pilihan Pak Imam terhadap Gerindra menunjukkan bahwa keputusan politiknya tidak didasarkan semata-mata pada fanatisme partai, tetapi pada kalkulasi peluang keterpilihan. Ia menilai bahwa persaingan internal di PDI lebih berat karena terdapat beberapa calon kuat dengan modal finansial besar. Gerindra dipilih karena struktur kompetisi internalnya dinilai lebih memungkinkan bagi dirinya. Keputusan ini memperlihatkan bahwa habitus politik Pak Imam terbentuk dari pengalaman membaca kontestasi lokal. Pileg bukan hanya persaingan antarpolisi, tetapi juga persaingan antarkandidat dalam partai yang sama. Kajian Ramadhani (2024) menunjukkan bahwa keberhasilan kandidat legislatif berkaitan dengan kemampuan menggunakan modal sosial, politik, dan ekonomi secara strategis dalam arena pemilihan.

“Kenapa pilihan jatuh ke Gerindra? Pada saat itu saya ndak punya uang, nah di PDI ada beberapa calon kuat. Calon kuat ini ketika kita ndak punya uang jadi atau tidaknya 50:50. Tapi kalau saya lewat Gerindra saya bisa memprediksi caleg-caleg yang ada itu saya jauh lebih kuat. Karena bisa kita baca itu. Kalau emang mau jadi dewan harus cari partai seng pesaingnya ndak kuat, wajib” (Informan Utama, 2026).

Pak Imam juga menekankan bahwa uang bukan satu-satunya penentu kemenangan. Basis massa yang kuat dan tim yang solid dapat mengimbangi keterbatasan finansial. Pandangan ini menunjukkan bahwa modal ekonomi tetap memiliki fungsi, tetapi tidak selalu menjadi modal dominan apabila kandidat memiliki jaringan sosial yang terorganisasi. Dalam Pileg, tim yang solid dapat mengubah modal sosial menjadi suara melalui kerja lapangan, pemetaan wilayah, dan mobilisasi pendukung. Strategi ini memperlihatkan relasi antara habitus, modal sosial, dan modal politik. Kajian Tampubolon (2025) juga menunjukkan bahwa kemenangan kandidat legislatif dapat dibangun melalui kepercayaan, relasi sosial, dan aktivitas lapangan, bukan hanya melalui modal ekonomi.

“Partai ini juga berharap yang bisa dipasang sebagai caleg harus orang kuat minimal memiliki basis massa yang kuat. Justru uang ini urutan kedua, karena dengan basis massa yang banyak tim yang solid bisa mengalahkan uang. Uang yang banyak timnya tidak solid itu bisa hancur” (Informan Utama, 2026).

Linking social capital juga digunakan Pak Imam untuk memperoleh informasi politik lintas wilayah. Relasi dengan tokoh tidak selalu dimanfaatkan untuk mendapatkan bantuan material, tetapi untuk membaca peta dukungan, basis lawan, dan peluang suara. Informasi semacam ini penting karena Pileg memiliki wilayah yang lebih luas dibandingkan Pilkades. Kandidat tidak dapat mengandalkan pengetahuan personal sebagaimana dalam desa asal. Tokoh lokal menjadi sumber informasi strategis yang membantu tim menentukan wilayah yang layak digarap dan wilayah yang sebaiknya tidak dipaksakan. Kajian Pioh (2024) menunjukkan bahwa aktor perantara dalam pemilihan lokal tidak hanya mengumpulkan suara, tetapi juga menyediakan informasi sosial-politik yang dibutuhkan kandidat.

“Kalau kemenangan di Pileg yang terbaik tetap jalinan komunikasi di beberapa tempat di tokoh itu juga penting. Karena begini, tokoh itu kadang tidak membantu, tapi kadang yang kita butuhkan informasi. Ada informasi di sana itu seperti apa. Jadi ketika misalnya konsolidasi dengan lingkungan si A si B, kita ini tahu wo itu basisnya si A si B. Jadi kalau ndak memungkinkan ndak usah dipaksa” (Informan Utama, 2026).

Proses political rebound Pak Imam terjadi melalui konversi modal lintas arena. Kekalahan dalam Pilkades menunjukkan pelemahan bonding capital akibat arena desa yang sempit, kelengahan tim, fragmentasi sosial, dan praktik botohan. Kemenangan dalam Pileg menunjukkan kemampuan aktor mengaktifkan modal yang masih tersisa dan mengalihkannya ke arena yang lebih luas. Modal simbolik sebagai mantan kepala desa berprestasi digunakan untuk membangun legitimasi. Bridging capital diaktifkan melalui jaringan lintas desa dan pendekatan programatik. Linking capital digunakan untuk memperoleh informasi politik dan menentukan strategi wilayah. Kajian-kajian mutakhir tentang politik elektoral lokal menunjukkan bahwa kemenangan kandidat tidak hanya bergantung pada uang, tetapi juga pada jaringan sosial, broker, kepercayaan, aktivitas lapangan, dan kemampuan membaca arena politik (Aspinall & Rohman, 2017; Pioh, 2024; Tampubolon, 2025)

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kekalahan mantan Kepala Desa Tasikmadu dalam Pilkades tidak secara otomatis mengakhiri karier politiknya, tetapi menjadi titik peralihan menuju arena politik yang lebih luas melalui proses political rebound. Kekalahan dalam Pilkades terjadi karena melemahnya bonding social capital di desa asal akibat karakter Pilkades yang sempit, personal, dan sarat sentimen sosial, serta dipengaruhi oleh kelengahan tim pendukung, praktik botohan, dan fragmentasi sosial antarwarga. Keberhasilan dalam Pileg menunjukkan bahwa modal sosial dan modal simbolik aktor tidak hilang, melainkan dikonversi melalui aktivasi bridging social capital lintas desa, pemanfaatan linking social capital dengan tokoh lokal, rekam jejak kepemimpinan sebagai modal simbolik, serta habitus adaptif dalam membaca peluang partai dan peta dukungan elektoral. Dengan demikian, keberhasilan Pak Imam menjadi anggota DPRD merupakan hasil dari kemampuan mengelola kekalahan, membaca perubahan ranah politik, dan mengonversi modal yang telah terakumulasi selama menjadi kepala desa ke dalam strategi elektoral yang lebih luas.

REFERENSI

- Amalia, D. R. (2025). Campaign strategies and social network dynamics: A case study of successful legislative candidates in Kolaka Regency, Indonesia. *Golden Ratio of Data in Summary*, 5(1).
- Aspinall, E., & Rohman, N. (2017). Village head elections in Java: Money politics and brokerage in the remaking of Indonesia's rural elite. *Journal of Southeast Asian Studies*, 48(1), 31–52. <https://doi.org/10.1017/S0022463416000461>
- ASWAN, A. (2025). *Selera Politik Masyarakat Indonesia (Sebuah Pendekatan Bourdieu Terhadap Pembentukan Opini Publik)= The Political Tastes of Indonesian Society (A Bourdieu Approach to the Formation of Public Opinion)* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J. G. Richardson (Ed.), *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education* (pp. 241–258). Greenwood Press.
- Bourdieu, P. (1990). *The Logic of Practice*. Stanford University Press.
- Bourdieu, P. (1991). *Language and Symbolic Power*. Harvard University Press.
- Chalik, A. (2017). *Pertarungan elite dalam politik lokal*. Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Pustaka Pelajar.
- Dewi, A. H. (2024). *Kapasitas Ketahanan Dan Kekuatan Modal Sosial Masyarakat Miskin Perkotaan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung Dalam Menghadapi Bencana Covid-19*.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

- Haridison, A. (2024). "Bakas Lewu": Political broker in the Manduing Taheta village head election. *Jurnal Ilmu Sosial*.
- Hidayat, E. (2019). Proses Demokrasi Desa dan Strategi Pemenangan Berbasis Budaya Jawa di Pilkades Desa Tanjung Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri. *Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi*, 10-26.
- Hidayaturrehman, M., Sudarman, Hamhij, N. A., Sugiantiningsih, A. A. P., Ubaid, A. H., & Elazhari, E. (2022). Political broker giving money and intimidating in regional head elections in Indonesia. *Jurnal Studi Sosial dan Politik*, 6(2), 177–190. <https://doi.org/10.19109/jssp.v6i2.10102>
- Kamal, M. R. (2024). Modal Politik Agil Siradj Ahmad Caleg Dapil 1 Kabupaten Kolaka Dalam Pemilu 2024= Political Capital Agil Siradj Ahmad Candidate For Dapil I Kolaka Regency In The 2024 Election (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Krisdinanto, N. (2014). Pierre Bourdieu, Sang Juru Damai: Pierre Bourdieu, The Peaceful. *KANAL: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(2), 189-206.
- Kristiyanto, H., Arinanto, S., & Ghafur, H. S. (2023). Institutionalization and party resilience in Indonesian electoral democracy. *Heliyon*, 9(12), e22919. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e22919>
- Luthfy, R. M. (2014). Potret legislatif desa pasca reformasi.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Pioh, N. R., Palenewen, J. D., & Bataha, K. (2024). Political brokers in head of village elections: A case study in Sangal Village and Rantau Bangkang Village, Central Kalimantan Province, Indonesia. *Journal of Governance and Public Policy*, 11(2).
- Ramadhani, R., Solihah, R., & Witianti, S. (2024). The correlation of social, political, and economic capital: A study of incumbent's capital utilization in the 2024 legislative elections. *Journal La Sociale*, 5(4), 1152–1166. <https://doi.org/10.37899/journal-la-sociale.v5i4.1292>
- Sabaggalet, Y. (2024). Uma's social capital in the 2024 legislative election. *Jurnal Horizon Pendidikan*.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Syukri, M., Permata Bachtiar, P., Kurniawan, A., Satria, G., & Sedyadi, M. (2018). Studi implementasi undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang desa. Laporan Penelitian SMERU.
- Tampubolon, D. D. W. A., Pasaribu, I., Putri, R. J., & Nasuhaidi. (2025). Political capital and electoral strategy of Terri Genta Sansui Siregar in the 2024 DPRD election of North Tapanuli Regency. *Journal of Politics and Democracy*, 5(1), 36–47. <https://doi.org/10.61183/polikrasi.v5i1.108>
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). SAGE Publications.